

Nilai Ekonomi Pendidikan Menengah: Temuan Dari Data Susenas 2001

Elfindri

Abstract

Continuing to expand the middle level education is partly as an objective of education policy to fulfill equity in developing countries, like in Indonesia. The quantitative objective of equity is already stated in the long-term development plan of education- where at least 80% of younger age population aged from 16-18 years are enrolled in middle level education- levels of education are for general and vocational objectives. To meet the equity objectives of the development plan, the number of general and vocational schooling has growing very fast throughout the country. The question is that whether in the labor market, the returns of schooling were predictable, and whether these signals were taken as a consideration as the basis to expand the expansion of education. According to available evidences from the developed countries studies, returned to schooling of middle levels is quite low. The Mincerian Hypothesis will be used to observe the returns to schooling based on the Susenas 2001 with the sample data West Sumatera. The data shows that the returns to middle level education are relatively low -ranges from 4-17%. Vocational school graduates much higher than these general school graduates. Female graduates were also higher their return to schooling then their male counterparts. The implication of this study is discussed.

Kata Kunci: Ekonomi pendidikan – Pendidikan menengah – Pengembalian investasi

Key Word: Economic of education – Secondary education – Investment returns

1. PENDAHULUAN

Mungkin setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akan menjawab bahwa mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan umum dimaksudkan untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan jenjang pendidikan umum. Dan mereka yang memasuki pendidikan kejuruan akan menjawab bahwa setelah selesai pendidikan akan bekerja langsung untuk memperoleh pekerjaan. Jawaban tersebut akan semakin jelas bahwa kenyataan di tengah masyarakat, pendidikan kejuruan adalah merupakan jenjang pendidikan untuk menampung mereka yang relatif sulit melanjutkan pendidikan sekaligus mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memperoleh pendidikan. Dengan arti kata bahwa masyarakat memilih jenjang pendidikan tertentu masih dapat dikatakan hampir tidak ada yang memperhitungkan tingkat pengembalian yang bakal mereka peroleh setelah menyelesaikan pendidikan, atau sewaktu mereka bekerja.

Dalam perspektif pemenuhan pemerataan pendidikan, target untuk kelompok masyarakat berusia selevel pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dapat mengecap pendidikan adalah sebesar 80%, pada saat mana kondisi daftaran murid untuk usia 16-18 tahun di Sumatera Barat baru mencapai sekitar 40% (BPS, 2000). Dengan kata lain diperlukan program perluasan sarana pendidikan untuk menampung para tamatan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), agar pemerataan pendidikan pada jenjang menengah dapat dipenuhi. Sedangkan dari perspektif kualitas pendidikan juga diharapkan dapat menghasilkan setidaknya mereka yang akan memasuki lapangan kerja atau menciptakan pekerjaan baru. Dengan mengetahui pengembalian pendidikan, maka jelas akan membantu mengarahkan program perluasan pendidikan jenjang menengah secara lebih tepat dan efektif.

Untuk mengetahui secara persis besarnya pengembalian dari pendidikan pada jenjang menengah¹, maka diperlukan bukti empiris

¹ Jenjang pendidikan menengah lebih khusus lagi menjadi perhatian utama karena tingkat daftaran murid untuk pendidikan pada jenjang ini masih jauh dari yang ideal dicapai pada suatu masyarakat. Padahal pada jenjang pendidikan dasar, untuk usia 7-15 tahun sebagai wajib belajar, sudah menunjukkan kecenderungan yang meningkat

tentang berapa besarnya tingkat pengembalian jenjang pendidikan, lebih khusus lagi bilamana dibandingkan besarnya tingkat pengembalian individu antara mereka yang menyelesaikan jenjang pendidikan umum serta jenjang pendidikan kejuruan, dengan dikontrol melalui jenis kelamin, tempat tinggal dan lainnya².

2. PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA

Pendidikan jenjang menengah di Indonesia menjadi penting dipelajari mengingat setidaknya sekitar 80% dari anak-anak usia, asumsikan antara 16-18 tahun, berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Selain itu pendidikan menengah adalah pendidikan pada *level* dimana proses pendidikan menjelang memasuki dunia kerja serta menjelang memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Analisis bagian ini memfokuskan kepada dua hal, *pertama* adalah bagaimana perkembangan pendidikan menengah dilihat dari sisi penawaran serta hasil yang dicapai pada pasar kerja? *Kedua* adalah bagaimana pembiayaan yang terjadi selama ini baik pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat? Kedua pertanyaan ini menjadi penting untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan strategi pengembangan pendidikan menengah pada masa masa yang akan datang.

Perkembangan pendidikan menengah di Indonesia adalah merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta atas perkembangan permintaan. Dari sisi permintaan pendidikan jumlah siswa yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal setidaknya sebanyak 35 juta orang, sebuah peningkatan sekitar 4 juta lebih dibandingkan awal tahun 1990-an. Dari jumlah tersebut sebanyak 8,2 juta anak-anak yang memasuki jenjang

bahkan angka terakhir sudah menunjukkan sekitar 92% (BPS, 2001), dengan arti kata penyediaan fasilitas fisik bukan lagi menjadi kendala dalam pencapaian target pemerataan pendidikan.

² Penelitian ini dibiayai melalui dana Hibah Penelitian Kompetitif, proyek *Development of Undergraduate Education (DUE-Like)* secara kompetitif pada jurusan Ekonomi Pembangunan. Segala materi tulisan ini adalah tanggungjawab penulis, bukan tanggungjawab institusi. Terimakasih kepada staf BPS yang telah membantu mengolah data Susenas 2001, dan kepada Badan Pusat Statistik Sumatera Barat atas izinnya menggunakan data ini. *Contract person* dapat dilakukan melalui elfindrifeua@yahoo.com.au

pendidikan SLTP dan SLTA. Kalau sekitar periode tahun 1990-an jumlah permintaan akan bangku sekolah menengah atas sekitar 1,6 juta orang, maka dalam waktu sepuluh tahun, tahun 2000, permintaan tersebut meningkat menjadi 2,6 juta orang, atau sekitar 1 juta pertambahannya. Sementara untuk jenjang SLTP kebutuhan penyediaan bangku sekolah pada tahun 2000 meningkat menjadi sebesar 6,0 juta saat mana pada tahun 1990 hanya sebesar 3,7 juta orang. Artinya periode tahun 1990-2000, kelihatannya permintaan pendidikan relatif lebih banyak terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama yang cukup wajar mengingat tahun 1993 rencana memperpanjang wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun (BPS, 2001).

Pada periode sepuluh tahun mendatang jumlah dari permintaan akan jenjang pendidikan menengah atas akan meningkat secara tajam, mengingat dua kenyataan. Pertama adalah pergeseran dari usia penduduk yang lahir pada periode tahun 1980 dan 1990-an yang sudah memasuki jenjang pendidikan menengah pertama (SLTP), maupun jenjang pendidikan menengah atas (SMA). Bergeseran tersebut secara relatif lebih banyak dibandingkan dengan periode 10 tahun sebelumnya. Kedua adalah dari sisi pemerataan pendidikan sendiri, yaitu target yang diharapkan pada tingkat daftaran murid sebesar 80% untuk kelompok usia 16-18 tahun memerlukan tambahan sekolah beserta ruangan yang tidak sedikit, mengingat pencapaian dari daftaran murid tahun 2000 untuk kelompok yang sama baru mencapai sebesar 36-42%, tergantung lokasi dan latar belakang sosial ekonomi rumah tangga. Dengan demikian secara proporsi, setidaknya diperlukan tambahan permintaan pendidikan yang potensial untuk disediakan sekitar 30-40% lagi dari mereka yang masuk ke dalam kelompok umur 16-18 tahun, dan pada umumnya pada kondisi tahun 2000 sudah menarik diri dari pendidikan formal akibat berbagai alasan dan telah memasuki pasar kerja.

Untuk merespon hal itu telah terlihat melalui peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Kenyataan memperlihatkan bahwa jumlah sekolah bertambah untuk memenuhi pertambahan permintaan pendidikan sepertinya direspon oleh Pihak swasta relatif lebih tinggi dibandingkan dengan level pendidikan pada jenjang sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah pertambahan pengelolaan pendidikan, baik yang berasal dari pengelola pendidikan yayasan keagamaan, atau swasta lainnya, sementara pertambahan jenjang pendidikan SMU sepertinya

lebih banyak kejujuran terjadi pada jenjang pendidikan umum (general) dari pada perkembangan jenjang pendidikan vocational (Tabel 1). Dengan arti kata ada kecenderungan bahwa penambahan pendidikan umum menjadi lebih banyak dijadikan sebagai strategi untuk memenuhi perluasan aspek pemerataan.

Tabel 1
Indonesia: Perkembangan Sekolah, Guru dan Murid antara SMU dan SMK 1995/1996-1997/98

	1995/96		1996/97		1997/98	
	SMU	SMK	SMU	SMK	SMU	SMK
Sekolah	7.901	3813	8.065	3.894	8.241	4.006
Guru	208.943	118.464	214.289	119.814	219.783	127.270
Murid	2.577.341	1.648.482	2.684.224	1.767.161	2.864.633	1.862.060

Sumber: BPS (2001, Tabel 4.1.4., hal 108-09)

Alasan yang melatarbelakangi cara berpikir seperti itu mungkin saja atas dasar berbagai hal. Pertama adalah pemerintah merespon permintaan pendidikan dari masyarakat, dimana kecenderungan pilihan masyarakat relatif lebih banyak untuk memasuki jenjang pendidikan umum ketimbang jenjang pendidikan kejuruan. Selain itu investasi untuk pengembangan sekolah kejuruan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan umum, khususnya untuk pengadaan peralatan laboratorium dan bengkel kerja. Selain dari itu ada kecenderungan juga bahwa pemerintah menggunakan kriteria dimana tingkat pengembalian sosial jenjang pendidikan umum relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan kejuruan. Padahal bilamana dilihat dari struktur pembiayaan pendidikan oleh pemerintah, rata-rata pengeluaran pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah atas relatif lebih tinggi sekitar 1,8 kali lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan pra sekolah dan SD. Sementara pengeluaran pendidikan oleh pemerintah pada jenjang pendidikan menengah atas sekitar sepertiga dibandingkan dengan pengeluaran untuk jenjang pendidikan tinggi (Tabel 2). Lieberman et. al. (2002) melihat data pengeluaran anggaran pendidikan di Indonesia yang berkesimpulan bahwa telah terjadi penurunan secara riil anggaran pendidikan per siswa setelah krisis setidaknya sebesar 20% lebih rendah dari sebelumnya dan kecenderungan peningkatan anggaran secara riil untuk TK dan SD. Hal

ini merupakan reaksi dari rencana pencapaian wajib belajar pendidikan sembilan tahun, walaupun masih disayangkan untuk jenjang pendidikan lainnya menunjukkan penurunan pengeluaran per kepala dari pemerintah secara signifikan.

Tabel 2
Indonesia Pengeluaran Pendidikan oleh Pemerintah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
(1993= harga konstan)

Jenjang Pendidikan	1990/91	1995/96	1999/00
TK dan SD			
• Jumlah	4.281,7	5.780,4	5.119,6
• Per murid (Rp/tahun)	174.173	238.287	212.888
SLTP			
• Jumlah	1.361,0	1.875,5	1.836,5
• Per murid (Rp/tahun)	361.706	372.244	312.062
SLTA			
• Jumlah	899,3	1.108,5	1.138,0
• Per murid (Rp/Tahun)	525.227	522.628	454.483
Peguran Tinggi			
• Jumlah	1.219,6	1.375,7	1.483,1
• Per murid (Rp/Tahun)	2.334.258	1.215.339	1.233.436
Total b	7.816,2	10.291,3	9.677,7

A = dalam miliar Rupiah

B = belum termasuk pendidikan non-formal.

Sumber: Diolah kembali dari Lieberman, Juwono dan Iskandar (2002)

Pada tingkat rumah tangga, pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak masih jauh dari harapan. Tahun 2000, Susenas 2000 memperlihatkan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak per bulan berkisar sebesar Rp 5.500 yang setara dengan harga satu bungkus rokok kretek anak muda. Dengan demikian dengan asumsi kemencengan dari temuan tersebut sebesar 5%, maka setidaknya hanya sekitar Rp 90.000 pengeluaran terhadap pendidikan yang berasal dari dukungan dari rumah tangga (Elfindri, 2001b). Katakan periode ketika sebelum krisis pengeluaran rata-rata pemerintah untuk pendidikan anak adalah Rp 335.772 per tahun, berarti dukungan rumah tangga terhadap pengeluaran pendidikan hanya berkisar antara 20-25% dari pengeluaran keseluruhan pendidikan yang terjadi.

Alasan-alasan di atas bahkan menjadi tidak masuk akal lagi kalau pemerintah menggunakan kriteria penghasilan dan tingkat pengangguran yang terjadi antar tamatan pendidikan menengah umum dan kejuruan. Dari pengamatan pasar kerja yang diperlihatkan melalui dua kriteria, pertama adalah persentase angkatan kerja yang bekerja menurut pendidikan. Kedua adalah rata-rata kesejahteraan yang diterima antara pendidikan umum dan kejuruan. Manning (2001) secara konsisten memperlihatkan bahwa secara relatif daya serap angkatan kerja yang memiliki latar belakang kejuruan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan umum, dan hal ini berlaku juga untuk wanita (Elfindri, 1989). Selain dari itu kesejahteraan tenaga kerja juga memperlihatkan kecenderungan bahwa tamatan pendidikan kejuruan secara relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan umum (Elfindri, 1990). Data Sensus tahun 1980 dan Supas 1985 untuk maksud yang sama telah pula dianalisis oleh Jones (1997) untuk kondisi Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan suatu indikasi bahwa justru tamatan pendidikan kejuruan lebih besar distribusinya secara relatif pada pekerjaan tenaga administrasi, sementara untuk jenjang pendidikan umum sebagai tenaga profesional dan produksi. Dengan arti kata sebenarnya pada pasar kerja tidak terlihat secara tajam perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tamatan SLTA. Dari analisis di atas jelaslah kiranya bahwa pengembangan pendidikan menurut jenis pendidikan masih belum jelas dasar pertimbangan utamanya.

3. MANFAAT PENDIDIKAN

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai *stock* manusia. Dimana nilai *stock* manusia setelah mengikuti pendidikan, dengan berbagai jenis, jenjang dan bentuk pendidikan, dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai. Para ekonom mengklasifikasikan bahwa nilai yang diperoleh adalah berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan nilai sosial "*social benefits*" individu dibandingkan dengan sebelum mengesap pendidikan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan proses investasi saat sekarang, maka manfaat yang akan diperoleh oleh individu adalah pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan nilai stok manusia, maka seseorang atau rumah

tangga juga perlu mengorbankan biaya baik yang ditanggung oleh individu maupun oleh masyarakat (Elfindri, 2001a).

Untuk melakukan taksiran pengembalian pendidikan, maka Jacob Mincer (1974) mengajukan metode perhitungan dengan mengestimasi persamaan semi log penghasilan individu pasca pendidikan (Log Y), dan pendidikan (ED) dan Pengalaman (EXP) sebagai *explanatory variables* yang dapat diperlihatkan dalam persamaan fungsi kuadratik semi log sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_{it} = a + b \text{ ED}_{it} - c \text{ ED}_{it}^2 + d \text{ EXP}_{it} - e \text{ EXP}_{it}^2 + e_{it}$$

Dimana Log Y_i adalah log penghasilan seorang pekerja i pada saat waktu tertentu t , dan ED_{it} adalah lamanya pendidikan seorang pekerja i dan EXP_{it} adalah lamanya seorang tenaga kerja i bekerja, biasanya dilakukan penaksiran secara tidak langsung dengan cara mengurangi usia responden saat survei dengan usia jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Keterbatasan dari model di atas berdasarkan beberapa hal. *Pertama* adalah model *semilog Mincer* sangat tergantung kepada struktur pasar kerja formal, dengan arti kata jumlah penerimaan yang diperoleh oleh tenaga kerja relatif pasti dalam kurun waktu pekerjaan tertentu (Gleewe, 1996). Seperti di Indonesia pasar kerja untuk status upah yang formal diperkirakan separuh dari jumlah pekerja keseluruhannya (Elfindri, 2001-a). *Kedua* adalah diberlakukannya intervensi pemerintah berupa penerapan upah minimum (*minimum wage*) diduga akan mempengaruhi struktur upah yang berlaku, dimana para pekerja berpendidikan menengah cenderung dibayar menuju standar upah minimum pada saat *labor union* masih belum signifikan fungsinya.

Pengembalian dari pendidikan seperti yang dikompilasi oleh Cohen (2001) memperlihatkan bahwa pekerja yang menamatkan pendidikan di Amerika Serikat memperoleh pengembalian pendidikan sebesar 9,3%. Cohen (2001) juga mengutip hasil olahan yang dilakukan oleh Bills dan Klenow (2000) memperlihatkan bahwa pengembalian pendidikan berbeda antar benua, yang terbesar terjadi pada negara Afrika (13,1%), kemudian yang terendah adalah pada kelompok negara OECD sebesar 6,9%. Sedangkan untuk Asia, Latin Amerika adalah

sebesar masing-masingnya 9,5% dan 10,9%. Selain dari itu hasil taksiran dari tahun dimana penghasilan seseorang mulai berkurang pertumbuhannya yang diperlihatkan oleh koefisien e berkisar antara 30-40 tahun, misalnya untuk Indonesia memperlihatkan pertambahan pendapatan yang semakin berkurang pada usia 36,1 tahun, Mexico pada usia 39 tahun, dan Amerika Serikat pada usia 35,7 tahun.

Tabel 3

Tingkat Pengembalian Individu Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

	Tahun Kajian	SMA (%)	SMK (%)
Negara Berkembang		16,0	12,0
Negara Industri Perancis	1970	10,1	7,6
Negara Berpendapatan Menengah Atas			
Cyprus	1979	6,8	5,5
Taiwan	1970	26,2	27,4
Negara Berpendapatan Menengah Bawah			
Colombia	1981	9,1	10,0
Indonesia	1978	32,0	18,0
Liberia	1983	20,0	14,0
Negara Berpendapatan Rendah			
Tanzania	1982	6,3	3,7
Indonesia (Ghozali)	1989	15,3 a	18,7 a
		15,4 b	17,3 b

Sumber: Dikompilasi oleh Ghozali (2000, Tabel 1).

Keterangan: a. Sekolah Negeri
B: Sekolah Swasta

Pengembalian individu kecenderungannya tinggi pada negara negara yang relatif miskin tahap pembangunannya (di bawah US\$ 1.000 pendapatan per kepala), kemudian menurun sejalan dengan meningkatnya penghasilan masyarakat (Ram, 1996). Selain dari itu pengembalian individu cenderung tertinggi pada jenjang pendidikan dasar dan menurun dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sedangkan pengembalian untuk jenis pendidikan umum cenderung relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan kejuruan. Pada kelompok tamatan perguruan tinggi untuk ilmu eksakta relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ilmu sosial (Psacharopoulos, dalam Elfindri, 2001a).

Kajian yang mengkhususkan taksiran pengembalian pendidikan dengan metoda *cost-benefit analysis* telah dikompilasi pula oleh Gozali (2000) seperti yang ditampilkan pada Tabel 3. Secara umum pengembalian pendidikan SMU untuk negara berkembang lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan pengembalian pendidikan untuk pendidikan kejuruan, dan tidak berlaku untuk Indonesia. Kecuali untuk Taiwan dan Kolumbia dimana pengembalian pendidikan untuk jenjang pendidikan kejuruan atas lebih tinggi dibandingkan dengan level yang sama untuk pendidikan umum. Dugaan besarnya pengembalian pendidikan kejuruan mengingat struktur ekonomi negara juga dapat lebih menguntungkan tamatan yang mendapatkan pendidikan kejuruan.

Dari analisis sebelumnya jelas memperlihatkan ketidakpastian dari hasil taksiran tingkat pengembalian, walaupun temuan jelas memperlihatkan kecenderungan bahwa pengembalian pendidikan setingkat SLTA baik pendidikan umum maupun kejuruan adalah berkisar antara 5-20%, tergantung dimana pendidikan tersebut diselesaikan oleh seseorang, pada kualitas pendidikan seperti apa serta pada pasar kerja bagaimana para alumninya melakukan pekerjaan³.

Analisis berikutnya akan dikemukakan bagaimana data Susenas 2001 diolah untuk menemukan taksiran tingkat pengembalian pendidikan untuk konteks Sumatera Barat⁴. Oleh karena perhatian kita adalah menaksir besarnya tingkat pengembalian, maka kontrol analisis seperlunya dilakukan, baik dengan memperhatikan lokasi, gender, maupun status perkawinan.

³ Di negara sedang berkembang lebih bercirikan kepada struktur pasar kerja yang hampir seimbang antara status pekerjaan formal dengan pekerjaan upahan. Sedangkan negara negara yang sudah maju pasar kerja lebih cenderung formal, dimana penghasilan masyarakat lebih jelas diperoleh dari sistem pengupahan yang berlaku. Hal ini akan menghasilkan suatu kondisi dimana taksiran pengembalian pendidikan di negara berkembang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan taksiran serupa dilakukan di negara negara yang sudah maju.

⁴ Sumatera Barat dipilih hanyalah atas dasar tersedianya data Susenas pada penulis, bukan berarti propinsi lainnya juga menarik untuk dilakukan kajian serupa untuk menghitung konsistensi hasil.

4. KETERBATASAN DATA

Untuk menghasilkan analisis yang memuaskan, maka sebenarnya informasi yang lebih detail mengenai latar belakang institusi pendidikan diperlukan, dengan maksud agar dapat diketahui lebih mendalam lagi pengaruh variasi dari institusi terhadap besar kecilnya tingkat pengembalian dari jenis pendidikan menengah. Mengingat pendidikan menengah seperti SLTA memiliki kriteria yang beragam, didasari oleh lokasi sekolah, lamanya sekolah berdiri, ketersediaan sarana laboratorium serta perpustakaan. Demikian juga Susenas juga tidak mengumpulkan secara detail tentang jenis pendidikan kejuruan yang diselesaikan, mengingat jenis pendidikan kejuruan juga tidak homogen, misalnya yang menyelenggarakan sekolah keteknikan, sekolah ekonomi menengah, serta penyelenggaraan pendidikan kejuruan lainnya.

Disamping itu Susenas juga tidak memperoleh gambaran yang rinci terhadap nilai pengembalian sosial dari setiap tamatan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Nilai pendidikan sosial adalah segala sesuatu yang diberikan oleh individu kepada orang lain dan dirasakan oleh orang lain manfaatnya. Nilai ini dapat diukur secara moneter maupun secara non moneter. Penjumlahan nilai positif tersebut adalah setara dengan "market wage rate". Implikasi dari keterbatasan dari informasi tersebut adalah bahwa setidaknya Susenas dapat dihitung untuk menemukan tingkat pengembalian individu seseorang yang sudah menamatkan pendidikan jenjang menengah atas.

Selain dari itu menghitung tingkat pengembalian individu secara relatif akan mudah dilakukan ketika seluruh komponen penerimaan individu diketahui secara pasti. Informasi itu akan diperoleh ketika individu pasca pendidikan memperoleh penghasilan dengan sistem pembayaran upah formal atau terikat dengan pasar kerja sistem upah (wage system). Dalam kenyataannya dalam sistem upah yang tidak formal, seperti seseorang yang memiliki status pekerjaan sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar tidak ada kepastian penghasilannya. Dan jumlah pekerja yang terikat ke dalam status pekerjaan ini jumlahnya sekitar separuh dari yang memasuki pasar kerja dengan demikian untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka dilakukan penyensoran data Susenas yang ada dengan cara menghitung individu yang hanya bekerja dan memiliki status pekerjaan sebagai buruh dan atau karyawan.

Bagian berikutnya akan membahas pengembalian investasi individu antar jenjang pendidikan SMU dan SMK. Untuk melihat seberapa besar tingkat pengembalian pendidikan menurut jenis pendidikan dilakukan dengan menggunakan prinsip perhitungan yang diajukan oleh Mincer (1974) yang juga digunakan peneliti lainnya peneliti lainnya untuk konteks negara OECD (Cohen, 2002). Model regresi linier semilog dengan metode backward pada data primer yang sudah diolah dari kuesioner SUSENAS 2001 yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah pengamatan adalah sebanyak 401.451, yaitu semua penduduk yang bertempat tinggal di Sumatera Barat yang berusia 15 tahun ke atas yang sekarang sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

5. KARAKTERISTIK *SAMPLE*

Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik pasar kerja mempengaruhi penghasilan. Dalam konteks pasar kerja di negara maju ada kecenderungan bahwa penghasilan individu lelaki dengan wanita cenderung menuju kesamaan, namun di negara berkembang cenderung lebih tinggi lelaki dibandingkan dengan wanita dalam skala dan jenis pekerjaan. Analisis Susenas 2001 memperlihatkan jenis kelamin pekerja merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap upah/gaji yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai.

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Upah yang diterima di Sumatera Barat (per bulan)

Karakteristik	25% terendah (Rp. 299.999)	25-49% (Rp.300.000- 499.999)	50-74% (Rp.500.000- 799.999)	75% tertinggi (Rp.800.000+)
Jenis Kelamin				
Pria	14,7%	29,2%	30,6%	25,5%
Wanita	35,9%	15,4%	23,1%	25,6%
Daerah				
Kota	17,8%	19,5%	30,8%	31,9%
Desa	24,9%	29,1%	25,8%	20,2%
Status Kawin				
Kawin	13,3%	20,6%	32,8%	33,3%
Lainnya	41,4%	34,2%	17,1%	7,3%

Sumber: Diolah dari Susenas Tape 2001.

Analisa menurut jenis kelamin ini menunjukkan perbedaan terhadap kelompok upah yang diterima. Adanya perbedaan rata-rata upah antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan ini tidak bisa secara langsung diartikan bahwa telah terjadi diskriminasi upah dalam pasar tenaga kerja. Bisa saja perbedaan upah tersebut merupakan implikasi dari adanya perbedaan kualitas dan produktivitas antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Dimana para pekerja perempuan lebih banyak yang menerima upah pada kelompok upah terkecil (Rp 300.000 atau lebih rendah). Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan ini semakin besar dengan semakin tingginya golongan kelompok upah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4 di atas dapat kita lihat bahwa responden yang mempunyai upah/gaji yang terkecil (Rp 300.000/bulan) untuk laki-laki sebanyak 14,7 persen dari seluruh kelompok upah/gaji pada jenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk perempuan sebanyak 35,9 persen dari seluruh kelompok upah pada jenis kelamin perempuan. Angka persentase untuk perempuan yang memperoleh upah rendah ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memperoleh upah yang sangat rendah, di bawah Rp 10.000 per hari (asumsikan di bawah US\$ 1,00, bila Rp 10.000= US\$1), asumsikan sebulan 30 hari kerja. Hal ini mungkin berkaitan dengan masih tingginya proporsi pekerja perempuan yang berpendidikan rendah. Kenyataan tingginya konsentrasi penduduk wanita yang menerima upah sebetulnya ditandai oleh sinyal jenis dan lamanya masa kerja antara wanita dan lelaki. Ada kecenderungan wanita lebih banyak memilih bekerja sebagai part time job, karena berbagai alasan diantaranya masih dijumpai konflik antara pekerjaan dengan pengasuhan pada wanita yang memiliki anak balita.

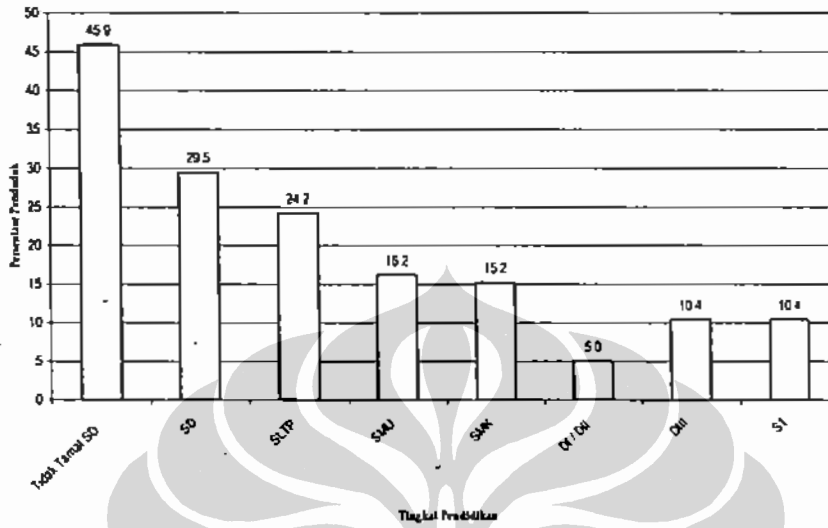
Pendidikan berbanding lurus atau berhubungan positif dengan upah/gaji, semakin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula upah/gaji yang akan diterima (Blaug, 1987; Elfindri, 2001a). Hubungan antara tingkat pendidikan dengan upah/gaji ini menjadi hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan tentang efisiensi alokasi sumberdaya, karena banyaknya pendapat yang mengemukakan bahwa orang yang berpendidikan akan menerima penghasilan yang lebih tinggi dari pada orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan lebih rendah

atau buta huruf karena mereka yang berpendidikan tinggi mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi pula.

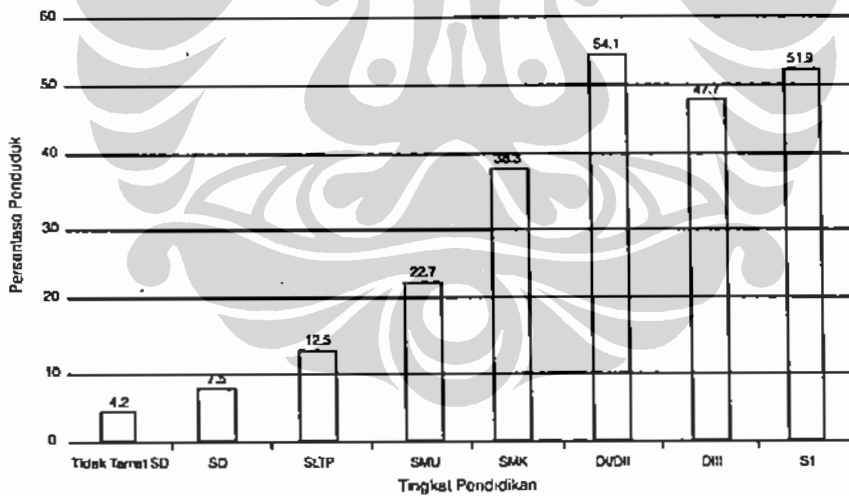
Penerima upah/gaji terbanyak dari kelompok upah pertama adalah mereka yang tidak tamat SD yang berjumlah sekitar 26,2 persen, kemudian diikuti oleh mereka yang hanya berpendidikan SD. Akan tetapi jika melihat untuk SLTP dan SMU jumlah mereka yang masuk kelompok pertama ini lebih banyak yang berpendidikan SMU dari SLTP, hal ini mungkin terjadi karena rendahnya mutu dari tamatan SMU atau dengan kata lain mutu mereka tidak jauh beda dari yang tamatan SLTP. Selanjutnya tidak begitu jelas perbedaan dalam upah/gaji yang diterima di perkotaan maupun yang di pedesaan. Di daerah perkotaan jumlah penerima upah/gaji terbesar berada pada kelompok upah/gaji tertinggi, atau dengan kata lain di perkotaan semakin tinggi kelompok upah/gaji semakin besar proporsi pekerjaanya, sedangkan di pedesaan jumlah terbesar terdapat pada kelompok upah menengah.

Selain perbedaan karakteristik jenis kelamin dan tempat tinggal, karakteristik penerima upah dapat dilihat menurut status perkawinan pekerja, pekerja yang berstatus kawin menerima upah lebih tinggi daripada pekerja yang bukan berstatus kawin. Pada kelompok upah tertinggi jumlah pekerja yang berstatus kawin sangat besar sekali proporsinya dibandingkan dengan yang berstatus lainnya, hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh usia, karena semakin tinggi usia semakin tinggi upah pekerja dengan asumsi setelah tamat menjalani pendidikan tertentu langsung terjun ke pasar kerja. Gambar 1-a dan Gambar 1-b memperlihatkan distribusi sampel menurut kelompok penghasilan lebih kecil dari Rp 300.000 per bulan dan 1 b penghasilan lebih besar Rp 800.000 per bulan menurut latar belakang pendidikan pekerja yang ditamatkan. Jelas ada kecenderungan penghasilan semakin tinggi diterima oleh mereka yang berpendidikan yang lebih tinggi dan sebaliknya.

Gambar 1-a
Sumatera Barat : Penghasilan Pekerja < Rp 3000.000,- Perbulan



Gambar 1-b
Sumatera Barat : Penghasilan Pekerja > Rp 8000.000,- Perbulan



Sumber: Diolah dari Susenas Tape 2001 Sumatera Barat

6. PENGEMBALIAN PENDIDIKAN MENENGAH: EMPIRIS UNTUK SUMATRA BARAT

Model Mincer terdahulu digunakan untuk menghitung koefisien tingkat pengembalian pendidikan, yang dibedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan. Dimana persamaan tersebut disederhanakan menjadi $\text{Log } Y_{it} = a + b_i \text{ED}_{it} + e_{it}$. Dimana $\text{Log } Y_{it}$ adalah log penghasilan pekerja sedangkan ED_{it} adalah dinilai 1 jika tamatan SLTA dan 0 lainnya. Untuk memuaskan hasil perhitungan maka sampel diseleksi dan ditaksir dengan memisahkan jenis kelamin (pria, dan wanita), kemudia pendidikan (umum dan kejuruan), tempat tinggal (desa dan kota). Sedangkan untuk melihat tingkat pengembalian pendidikan dari SMU dan SMK itu sendiri sesuai dengan tujuan dari tulisan ini maka tingkat pengembalian tersebut diperoleh dari koefisien b_i yang merupakan tingkat pengembalian individu dari pendidikan I dimana I adalah SMU dan SMK. Hasil tingkat pengembalian investasi individu dari pendidikan SMU dan SMK di Sumatera Barat dilaporkan pada Tabel 6.

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi individu dari pendidikan SMK lebih besar daripada pendidikan SMU. Hal ini terjadi disebabkan karena bahwa lulusan SMK memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja dari pada lulusan SMU. Mereka yang lulusan SMK telah memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang telah mereka pelajari semasa sekolah sehingga diduga terjadi efisiensi dalam proses memasuki pasar kerja dengan keahlian khusus yang mereka miliki tersebut. Keadaan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang berpendidikan SMK. Tingkat pengembalian pendidikan secara relatif lebih tinggi antara mereka berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan lelaki pada jenjang pendidikan yang sama. Dengan arti kata bukti ini menepis dugaan terjadinya ketimpangan pengembalian pendidikan yang promale bias.

Tabel 6
Tingkat Pengembalian Investasi Individu
dari Pendidikan SMU dan SMK menurut Jenis Kelamin (%)

	SMU	SMK
Jenis Kelamin		
Lelaki	4,2%	10,2%
Wanita	6,5%	14,2%
Total	7,7%	12,0%
Rasio Lelaki dan Wanita	0,65	0,70
Tempat Tinggal		
Kota	2,5%	4,9%
Desa	5,5%	16,9%
Total	4,0%	10,9%
Rasio Kota-Desa	0,45	0,29

Sumber: Diolah dari Susenas 2001

Beberapa dugaan penjelasan dari fenomena ini adalah mungkin disebabkan karena telah banyaknya industri yang berkembang yang lebih berspesialisasi menggunakan buruh/karyawan/pegawai perempuan lulusan sekolah menengah terutama SMK seperti pada industri makanan, pakaian, dan lain-lain kadangkala perempuan memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan laki-laki. Selain dari itu kecenderungan aspek kualitas pendidikan yang diperoleh berdasarkan proses belajar mengajar relatif lebih baik dijalani oleh anak perempuan dibandingkan dengan lelaki. Temuan di atas untuk Sumatera Barat relatif lebih tinggi untuk SMK dibandingkan dengan Indonesia pada periode tahun pertengahan 1980-an (Deolalikar, 1993), dan relatif mendekati kesamaan bilamana dibandingkan dengan pendidikan umum.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian investasi individu di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan terutama untuk jenis pendidikan SMK. Hal ini mungkin disebabkan karena telah banyak industri yang berdiri di daerah pedesaan yang menyerap banyak tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas terutama lulusan SMK seperti industri perkebunan, pertambangan. Keadaan serupa juga dianalisis oleh Manning periode tahun 1980-an untuk konteks pedesaan Jawa.

Jadi hasil perhitungan ini sama seperti hipotesa yang telah dikemukakan bahwa tingkat pengembalian investasi individu dari pendidikan SMK lebih besar dibandingkan pendidikan SMU. Selanjutnya kalau dilihat menurut jenis kelamin ternyata tingkat pengembalian perempuan lebih besar daripada laki-laki, begitu juga kalau dilihat berdasarkan daerah tingkat pengembalian di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, sehingga hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi individu atau rumah tangga untuk merencanakan pada jenjang pendidikan mana investasi akan dilakukan dengan asumsi bahwa individu bersangkutan tidak akan melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan kata lain selepas pendidikan menengah ini langsung terjun ke pasar kerja. Sayangnya analisa ini tidak dapat menunjukkan perbedaan atau mengkategorikan lagi kelompok pendidikan SMK ini menjadi kelompok teknik, ekonomi atau kesejahteraan keluarga karena keterbatasan data yang ada. Sehingga tidak bisa dilihat jenis pendidikan SMK mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap tingginya tingkat pengembalian investasi individu dari jenjang pendidikan SMK ini.

Tentu saja hal ini tidak saja hanya menjadi pertimbangan bagi rumah tangga atau individu saja tetapi juga bagi pemerintah dan pihak yang berkepentingan dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia Indonesia dan Sumatera Barat khususnya untuk lebih memperhatikan lagi ke arah mana sebaiknya investasi peningkatan sumberdaya manusia itu dilakukan baik itu investasi fisik, maupun investasi tenaga pengajar dan kurikulum karena jika pemerintah lebih memfokuskan peningkatan mutu sumberdaya manusia maka alangkah baiknya kalau lebih dikaji lagi mana jenis pendidikan yang akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih bermanfaat baik bagi individu itu sendiri, masyarakat maupun bagi negara, sehingga investasi yang dilakukan tidak akan menjadi sia-sia.

7. IMPLIKASI

Hasil temuan di Sumatera Barat dengan menggunakan data Susenas 2001 menunjukan variasi bilamana dibandingkan dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil pengembalian pendidikan mereka yang tamat SMK relatif mendekati dari berbagai temuan yang ada di negara sedang berkembang, untuk SMU hasil yang diperoleh

cenderung lebih rendah bilamana dibandingkan dengan temuan di tempat lain. Secara tegas ditemukan pengembalian SMK lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan pengembalian umum, sekalipun sudah dikontrol menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Ini menunjukkan kecenderungan pentingnya pengembangan dari pendidikan *vocational* sebagai salah satu alternatif perluasan kesempatan belajar untuk jenjang pendidikan menengah.

Relatif rendahnya tingkat pengembalian untuk jenjang SMU ada berkemungkinan atas beberapa interpretasi. Pertama adalah pendidikan SMU yang berkembang di Sumatera Barat mengalami kecenderungan penurunan mutu khususnya semenjak tahun 1990-an. Kecenderungan penurunan mutu ini menjadikan bahwa pendidikan menengah umum tidak jelas lagi dampaknya terhadap penghasilan individu, karena stock of capital individu menjadi tidak terlalu banyak perbedaan dengan jenjang pendidikan sebelumnya.

Dengan memahami temuan demikian jelaslah kiranya usaha untuk perluasan pemerataan dapat diupayakan dengan mengembangkan sekolah kejuruan. Sedangkan usaha untuk mengembangkan pengembalian pendidikan tidak lain dengan meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Setidaknya untuk dapat menjadikan tamatan dari SMU untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan pada perguruan tinggi.

8. DAFTAR BACAAN

- Blaug, M., (1987). *The economics of Education and Education for economists*, Edwar Elgar Publishing Limited.
- BPS, (2000). *Statistik Indonesia*, BPS Jakarta.
- , (2001). *Penduduk Indonesia Menurut Hasil Sensus Penduduk 2000*, BPS, Jakarta.
- Cohen, Daniel (2002). *Fear of Globalization: The Human Capital Nexus*, *Annual World Bank Conference on Development Economics 2001/2002*, Boris Pleskovic dan Nicholas Stern (Editors), The World Bank, Oxford University Press. Hal. 69-93.

- Deolalikar, A. (1993). Gender Differences in the Rate of Returns to Schooling and in School Enrolment Rates in Indonesia, *Journal of Human Resources*, XXXIII, 4, hal. 899-931.
- Elfindri (1989). Economic Determinant of Female Labour Force Participatiobn Rates in Indonesia, Unpublished MA Thesis, Flinders University, South Australia.
- , (1990). Segmentasi Tingkat Upah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 4, No 2, Universitas Andalas.
- , (2001a). *Ekonomi SDM*, Penerbit Universitas Andalas.
- , (2001b). Pembangunan Pendidikan: Sissue Untuk Perencanaan, Kebijakan dan Pendanaan, *Jurnal Penelitian Andalas*, No. 36, tahun XIII, hal. 27-48.
- Ghozali, A. (2000). Analisis Biaya-Manfaat SMU dan SMK, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22 (5), hal 57-85.
- Glewwe, P. (1996). The relevance of Standard estimates of Rates of Return to Schooling for Education Policy: A Critical Assessment, *Journal of Development Economics*, Vol 51, hal 267-290.
- Jones, G (1997). Jawa Timur: Perubahan Pendidikan dan Struktur Ketenagakerjaan Yang Berubah dalam, *Balance Development: East Java in The New Order* Dick dkk (editors), penerbit P.T Gramedia Pustaka Utama, hal. 107-140.
- Lieberman, S., M. Juwono dan S. Iskandar (2002). Government Education Expenditures in Indonesia Through December 2000: An Update, *Watching Brief*, July 15, Issues 1.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience and Earnings*, New York: Columbia University Press.
- Ram, Rati (1996). Level of Development and Rates of Return to Schooling: Some Estimates from Multicountry Data, *Economic Development and Cultural Change*, 44 (4), hal. 839-857. ■